

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara dikatakan maju dan berkembang apabila di berhasil menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan kesejahteraan melalui proses pembangunan. Pembangunan manusia yang di negara Indonesia merupakan hal yang penting untuk mewujudkan kualitas hidup manusia yang tinggi dan mendorong sistem pembangunan suatu negara maupun daerah (Jember & Adelfina, 2016). Menurut GA Bychkov & RP Yakunina (2015) teori pembangunan “klasik” yang didasarkan pada produk nasional bruto, beranggapan bahwa manusia hanya penggerak pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka tujuan utama kemajuan sosial. Meningkatkan kemampuan segala aspek suatu daerah maka harus meningkatkan kualitas hidup manusia.

Menurut Badan Pusat Stiatistik (2016) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Menurut GA Bychkov dan RP Yakunina (2015) mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang tercermin dengan penduduk yang berpendidikan dengan dilihat dari usia dewasa yang dapat membaca dan anak yang bersekolah, jumlah angka harapan hidup dan usia yang dilihat dari jumlah

penduduk, berketerampilan serta mempunyai penghasilan yang diukur dari pendapatan perkapita suatu negara untuk layak hidup.

Indeks Pembangunan Manusia bukan hanya sebuah tujuan untuk dicapai namun sebuah proses yang harus bekerjasama dengan pemerintah untuk menciptakan sumber daya yang berkualitas tinggi (Halmawati, dkk 2019). Peran pemerintah daerah melakukan pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan kebutuhan taraf hidup manusia sesuai dengan paradigma yang berkembang (Muji & Fattah, 2012). Menurut Rani dkk (2018) Keberhasilan program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maka akan menentukan keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah.

Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari indeks pembangunan manusia yang meningkat yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2019, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,92. Angka ini meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh sebesar 0,74 persen dibandingkan tahun 2018 berdasarkan Badan Pusat Statistik (2019). Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang ada nantinya diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul. Sejalan dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang dijangkau oleh masyarakat.

Berikut tabel indeks pembangunan manusia kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 – 2019 :

Tabel 1.1

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kabupaten Cilacap	67,77	68,60	68,90	69,56	69,98
2	Kabupaten Banyumas	69,89	70,49	70,75	71,30	71,96
3	Kabupaten Purbalingga	67,03	67,48	67,72	68,41	68,99
4	Kabupaten Banjarnegara	64,73	65,52	65,86	66,54	67,34
5	Kabupaten Kebumen	66,87	67,41	68,29	68,80	69,60
6	Kabupaten Purworejo	70,37	70,66	71,31	71,87	72,50
7	Kabupaten Wonosobo	65,70	66,19	66,89	67,81	68,27
8	Kabupaten Magelang	67,13	67,85	68,39	69,11	69,87
9	Kabupaten Boyolali	71,74	72,18	72,64	73,22	73,80
10	Kabupaten Klaten	73,81	73,97	74,25	74,79	75,29
11	Kabupaten Sukoharjo	74,53	75,06	75,56	76,07	76,84
12	Kabupaten Wonogiri	67,76	68,23	68,66	69,37	69,98
13	Kabupaten Karanganyar	74,26	74,90	75,22	75,54	75,89
14	Kabupaten Sragen	71,10	71,43	72,40	72,96	73,43
15	Kabupaten Grobogan	68,05	68,52	68,87	69,32	69,86
16	Kabupaten Blora	66,22	66,61	67,52	67,95	68,65
17	Kabupaten Rembang	68,18	68,60	68,95	69,46	70,15
18	Kabupaten Pati	68,51	69,03	70,12	70,71	71,35
19	Kabupaten Kudus	72,72	72,94	73,84	74,58	74,94
20	Kabupaten Jepara	70,02	70,25	70,79	71,38	71,88
21	Kabupaten Demak	69,75	70,10	70,41	71,26	71,87
22	Kabupaten Semarang	71,89	72,40	73,20	73,61	74,14
23	Kabupaten Temanggung	67,07	67,60	68,34	68,83	69,56
24	Kabupaten Kendal	69,57	70,11	70,62	71,28	71,97
25	Kabupaten Batang	65,46	66,38	67,35	67,86	68,42
26	Kabupaten Pekalongan	67,40	67,71	68,40	68,97	69,71
27	Kabupaten Pemasang	63,70	64,17	65,04	65,67	66,32
28	Kabupaten Tegal	65,04	65,84	66,44	67,33	68,24
29	Kabupaten Brebes	63,18	63,98	64,86	65,68	66,12

Lanjutan tabel 1.1

No	Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia				
		2015	2016	2017	2018	2019
30	Kota Magelang	76,39	77,16	77,84	78,31	78,80
31	Kota Surakarta	80,14	80,76	80,85	81,46	81,86
32	Kota Salatiga	80,96	81,14	81,68	82,41	83,12
33	Kota Semarang	80,23	81,19	82,01	82,72	83,19
34	Kota Pekalongan	72,69	73,32	73,77	74,24	74,77
35	Kota Tegal	72,96	73,55	73,95	74,44	74,93
	PROVINSI JAWA TENGAH	69,49	69,98	70,52	71,12	71,73

Berdasarkan data indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota mengalami peningkatan Indeks pembangunan manusia dari tahun ke tahun kurun waktu 5 tahun. Pada tahun 2019, Nilai indeks pembangunan manusia Jawa Tengah ada pada 71,73 mengalami peningkatan sebesar 0,61 poin berbeda dengan tahun 2018 yang besarnya 71,12. Dari tahun 2017 status pembangunan manusia di Jawa Tengah sudah mencapai Kategori Tinggi (IPM di atas 7), sementara kurun waktu 2010-2016 masuk kedalam kategori sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$). Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki pertumbuhan IPM dengan indikator sangat tinggi (≥ 80) kurun waktu 2015-2019 yaitu Kota Surakarta, Kota Salatiga dan Kota Pati. Sedangkan kabupaten Brebes memiliki IPM yang paling rendah pada tahun 2019 yaitu 66,12 namun sedemikian mengalami peningkatan sejak tahun 2015.

Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan akan tetapi masih ada daerah yang memiliki nilai indeks pembangunan manusia rendah kondisi ini masih perlu ditingkatkan terutama sektor pendidikan, pada sektor ekonomi masih terkendala oleh beberapa kondisi diantaranya kualitas dan kompetensi tenaga kerja. Hal lain pada kinerja pemerintah daerah yang mewujudkan pembangunan sesuai dengan tuntutan peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan publik yang memadai.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2019), tingkat kualitas hidup dari sisi kesehatan dilihat pada angka harapan hidup. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok “sangat tinggi”: $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi”: $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”: $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah”: $IPM < 60$

Nilai IPM suatu wilayah yang masuk dalam kelompok rendah, menengah maupun dalam kelompok tinggi, hal ini masih perlu untuk diperhatikan oleh pemerintahannya. Meningkatkan kualitas hidup manusia dengan memerhatikan secara teratur dan bersamaan dengan perhatian khusus harus dilakukan pada Kabupaten/Kota yang memiliki Nilai IPM kelompok rendah. Nilai IPM kelompok menengah dalam hal ini masih perlu adanya

optimalisasi. Hasil yang diharapkan adalah semakin tinggi IPM maka semakin tinggi pula kualitas hidup manusia.

Menurut UU 23 Tahun 2014 Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi berdasarkan Peraturan UU No. 33 Tahun 2004. Tujuan anggaran berimbang adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar daerah. Anggaran Perimbang digunakan oleh pemerintah daerah secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan.

Pendapatan asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan asli daerah yang sah, tujuan dari pendapatan asli daerah dikelola pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan penerimaannya dengan baik dan melakukan efisiensi terhadap belanja daerah dalam hal pembangunan, baik dalam hal infrastruktur, prasarana dan sarana di bidang sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan sehingga secara langsung dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat (Darsana & Wijayati, 2015). Menurut Sembiring (2019) Kemampuan daerah dalam mengolah sumber daya yang dimiliki dapat dijadikan sebagai sumber kekayaan bagi daerah. Pengelolaan daerah dapat

menciptakan lapangan kerja baru dan dapat merangsang perkembangan kegiatan ekonomi serta menambah pendapatan bagi daerah. Daerah otonom dapat memiliki pendapatan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangganya secara efektif dan efisien dengan memberikan pelayanan dan pembangunan.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Data badan pusat statistik menunjukkan angka pendapatan asli daerah pada tahun 2019 Jawa Tengah memperoleh 14.112.159 (dalam juta) kurun waktu tahun 2015 mengalami peningkatan. Jawa tengah masih terdapat kota/kabupaten yang memiliki pendapatan rendah maupun berdasarkan pengolahan pendapatan didaerah yang rendah. Penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Sembiring (2019) membuktikan bahwa pendapatan aset daerah berpengaruh terhadap IPM karena penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan asli daerah ini dapat digunakan secara bebas oleh daerah tersebut untuk pembangunan daerahnya. Oleh sebab itu semakin tinggi besaran pendapatan aset daerah yang didukung dengan menggali potensi yang maka semakin mandiri daerah tersebut jika dilihat dari sisi keuangannya. Hasil tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Rukmana & Juliana (2020), Jember, dkk (2016), Halmawati, dkk (2019). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiasih & Wiliantara (2016) yang membuktikan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Pelaksanaan desentralisasi dalam rangka untuk mendanai kebutuhan daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang bersumber dari APBN yang kita ketahui sebagai Dana Alokasi Umum berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004. Permasalahan desentralisasi fiskal merupakan salah satu aspek penting dalam desentralisasi fiskal mensyaratkan bahwa setiap kewenangan yang diberikan pemerintah daerah harus disertai pembiayaan yang besarnya sesuai dengan beban kewenangan daerah masing-masing (Yulianti & Afrizal, 2018).

Peneilitian terdahulu oleh Budiasih & Wiliantara (2016) suatu daerah dalam rangka mengurangi adanya kesenjangan fiskal salah satunya dengan cara pengalokasian dana yang sesuai dan bersumber dari APBN guna membiayai keperluan daerah serta menunjang pembangunan daerah. Tentunya setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dah hal tersebut menyebabkan kesenjanga fiskal satu daerah dengan daerah yang lain. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dari dana perimbangan yang dialokasikan oleh pemerintah, yaitu dana yang berasal dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhannya dalam rangka desentralisasi.

Penggunaan dana alokasi umum diharapkan untuk keperluan yang berorientasi pada pembangunan kualitas hidup manusia dengan mewujudkan melalui pembangunan serta perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang dialokasikan pada belanja modal. Kondisi masyarakat menjadi lebih baik maka pembangunan manusia akan berhasil pula jadi yang dipikirkan bukan

alokasi tinggi bagi kemajuan daerah tetapi pada pengalokasian yang tinggi untuk peningkatan kualitas hidup (Yulianti & Afrizal, 2018). Masyarakat berharap terhadap pemerintah daerah untuk dana dikelola dengan baik dan mengalokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat (Adiputra dkk, 2015).

Hasil Penelitian terdahulu menurut Subambang dan Rinanda (2020) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti setiap peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, didukung oleh penelitian Budiasih dan Wiliantara (2016), Ulupui dan Putra (2015), Rukmana & Juliana (2020). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan terdahulu oleh Halmawati dkk (2019), Fretes (2017) menunjukkan bukti bahwa dana alokasi umum terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap indeks pembangunan manusia. Membuktikan bahwa peningkatan dana alokasi umum yang terjadi berperan terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah selain Dana Alokasi Umum (DAU) adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus (DAK) ini digunakan

untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik menurut Subambang & Rinanda (2020). Menurut Febriani & Asmara (2018) penggunaan DAK pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan nasional dengan melalui pemerintah pusat. DAK akan menambah aset tetap pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, perbaikan infrastruktur fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

Penelitian yang dilakukan oleh Halmawati dkk (2016) menunjukkan bahwa variabel dana alokasi khusus terbukti berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Maknanya, peningkatan dana alokasi khusus (DAK) yang terjadi berperan terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia daerah tersebut, penelitian yang dilakukan sesuai yang dilakukan oleh penelitian Subambang & Rinanda (2020), Siregar (2017), Yulianti & Afif, 2018).

Untuk meningkatkan pembangunan manusia didukung pula dalam aspek ekonomi dan aspek yang lain. Tingkat pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan pembangunan yang merata. Pemerataan yang dilaksanakan

akan terciptanya pembangunan manusia yang berkualitas dan memperoleh hasil yang diharapkan (Ulupui & Putra, 2015). Menurut Kuncoro (2015) Pengelolaan sumber daya yang dikembangkan dengan membuka suatu lapangan pekerjaan akan menjadikan sebuah kerjasama antara pemerintah, pihak investasi dan masyarakat yang menimbulkan pertumbuhan ekonomi dalam lingkup suatu daerah dan meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Menurut Sutrisna & Dewi (2014) dengan adanya laju pertumbuhan ekonomi maka dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi supaya lebih meningkat serta mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi di era otonomi daerah. Pendapatan domestik regional bruto tinggi tidak memberikan acuan bahwa belum tentu memiliki IPM yang tinggi pula sebaliknya wilayah dengan tingkat IPM rendah belum tentu tingkat pendapatan domestik regional bruto daerah tersebut juga rendah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jember & Adelfina (2016) memberikan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Prihastuti (2018), Sutrisna & Dewi (2014), Jember & Adelfina (2016). Hasil berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti & Zamora (2019), Badera & Yashinta (2018) membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian ini mengembangkan yang dilakukan oleh Sembiring (2019) dan Halmawati dkk (2019). Karena masih adanya perbedaan hasil antar peneliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada

tahun penelitian, dimana pada penelitian terdahulu menggunakan data tahun 2014-2017, sedangkan penelitian ini menggunakan data tahun 2015- 2019.

Pada penelitian Sembiring (2019) di Sumatera utara menggunakan indikator utama Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan dimensi pendidikan yang masih rendah penelitian sedangkan pengambilan sampel penelitian ini berlokasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah indikator pada Indeks Pembangunan Manusia berdasarkan dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi pengeluaran. Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah didasari karena Indeks pembangunan Manusia Indonesia dari dari tahun ke tahun terus meningkat.

Pada variabel penelitian, peneliti menambahkan variabel Pertumbuhan Ekonomi, untuk diuji pengaruhnya terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Perbedaan tahun penelitian dengan penelitian sebelumnya. Pemilihan variabel ini karena diketahui pertumbuhan ekonomi merupakan variabel penting yang menjelaskan kekuatan hubungan antara pembangunan manusia (Prihastuti, 2018).

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui kualitas sumber daya masyarakat, sehingga tujuan dari organisasi publik sebagai penyedia layanan masyarakat yang baik dapat tercapai. Dengan demikian peneliti merumuskan judul penelitian sebagai berikut : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2015-2019”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2015-2019?
2. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2015-2019?
3. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2015-2019?
4. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2015-2019?

1.3. Pembatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa cakupan batasan penelitian, yaitu:

1. Penelitian ini hanya membahas pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di kabupaten/kota provinsi jawa tengah.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan Laporan Realisasi APBD Tahun 2015-2019.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
2. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
3. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia
4. Untuk memberikan bukti empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan, antara lain:

1. Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan

Mampu menjadi referensi dan tambahan informasi untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai salah satu acuan atau referensi dalam efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota se-Jawa Tengah